

PEMBIAYAAN KAPAL DAN PERUSAHAAN PELAYARAN

Leli Roswita¹
leliroswita02@gmail.com
Eliyanti Agus Mokodompit²

^{1,2}Universitas Haluoleo

ABSTRACT

The shipping industry is the backbone of Indonesia's trade and logistics system, playing a vital role in connecting thousands of islands across the archipelago. One of the most crucial aspects of shipping industry development is the financing of ships and shipping companies. Investment in this sector requires substantial capital, has a long payback period, and faces various external risks such as fluctuations in the global economy and fuel prices. This article aims to discuss the concepts, mechanisms, and challenges of ship financing in Indonesia, as well as offer strategies to improve the efficiency and sustainability of the shipping industry. The study shows that ship financing requires strong regulatory support, innovative financial instruments such as blue bonds, and collaboration between the government, financial institutions, and business actors.

Keywords: *Ship Financing, Shipping, Companies, Maritime Industry, Blue Economy, Sustainable Investment.*

ABSTRAK

Industri pelayaran merupakan tulang punggung sistem perdagangan dan logistik Indonesia yang berperan penting dalam menghubungkan ribuan pulau di nusantara. Salah satu aspek paling krusial dalam pengembangan industri pelayaran adalah pembiayaan kapal dan perusahaan pelayaran. Investasi pada sektor ini membutuhkan dana yang besar, waktu pengembalian yang panjang, dan menghadapi berbagai risiko eksternal seperti fluktuasi ekonomi global dan harga bahan bakar. Artikel ini bertujuan untuk membahas konsep, mekanisme, dan tantangan pembiayaan kapal di Indonesia, serta menawarkan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan industri pelayaran. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembiayaan kapal memerlukan dukungan regulasi yang kuat, instrumen keuangan inovatif seperti *blue bonds*, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha.

Kata Kunci: Pembiayaan Kapal, Perusahaan Pelayaran, Indutri Maritim, Ekonomi Biru, Inestasi Berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan dunia. sektor pelayaran nasional menjadi kunci utama dalam menunjang konektivitas antar wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis maritim. Namun, pengembangan sektor pelayaran masih terkendala oleh persoalan klasik yaitu pembiayaan kapal dan investasi armada.

Perkembangan pesat dalam dunia bisnis telah meningkatkan kompleksitas permasalahan di perusahaan yang sedang tumbuh, menjadi tantangan bagi pimpinan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Para pimpinan tidak hanya perlu melakukan pengawasan langsung, tetapi juga harus membuat kebijakan yang efektif untuk menentukan arah dan prioritas perusahaan. Perencanaan yang cermat sangat penting untuk memastikan setiap alternatif yang dipilih sejalan dengan visi dan misi perusahaan, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap arah dan performa perusahaan. Pengambilan keputusan melibatkan berbagai pihak di perusahaan, mulai dari top leadership, manajer, hingga karyawan, serta konsultan eksternal, dan sering kali membutuhkan kolaborasi antar tingkatan dan fungsi.

Kapal merupakan aset dengan nilai ekonomi tinggi dan umur operasional yang panjang. untuk membeli satu unit kapal berkapasitas menengah saja, diperlukan biaya mencapai jutaan dolar

Amerika. Hal ini menyebabkan perusahaan pelayaran membutuhkan akses pembiayaan yang besar dan berjangka panjang. Sayangnya, sistem pembiayaan maritim di Indonesia masih terbatas, baik dari sisi lembaga keuangan maupun dukungan pemerintah. Oleh karena itu, kajian mengenai mekanisme pembiayaan kapal, tantangan pembiayaan maritim, serta peluang inovasi fungsional menjadi penting dalam konteks penguatan industri pelayaran nasional.

Dalam hal ini Peran pemerintah menjadi sangat strategis, baik sebagai penyedia langsung layanan pelayaran maupun sebagai fasilitator yang menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah telah mengembangkan berbagai skema intervensi, mulai dari subsidi operasi kapal perintis, pembangunan kapal negara, hingga penyediaan pembiayaan berbunga rendah melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan lembaga keuangan daerah. Namun demikian, keterbatasan fiskal dan tingginya kebutuhan pembiayaan membuat keterlibatan sektor swasta menjadi semakin krusial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Studi Literatur adalah studi teori-teori yang akan digunakan dalam menyelesaikan studi serta untuk lebih memahami permasalahan yang

akan dibahas dalam studi ini. Referensi-referensi untuk mengerjakan jurnal ini didapatkan dari buku, jurnal ilmiah, paper, studi sebelumnya yang masih berkaitan, dan browsing dari internet yang kompeten dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu melakukan studi lapangan apakah teori yang didapatkan mempunyai relevansi sehingga metode studi ini dapat mengarah kepada sinkronisasi berupa problem solving. Dasar teori yang menjadi fokus untuk ditelaah antara lain:

- Dasar teori pemahaman secara umum tentang kapal dan proses pembangunan kapal baru.
- Dasar teori tentang pembiayaan pembangunan kapal baru
- Mekanisme proses pengajuan kredit KUR kepada lembaga perbankan
- Implementasi panduan proses pengajuan kredit KUR untuk pembiayaan pembangunan kapal baru.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Konsep dan Model pembiayaan Kapal

Pembiayaan kapal merupakan salah satu aspek penting dalam industri pelayaran karena menyangkut kebutuhan modal yang besaruntuk pembangunan, pembelian, maupun pengoperasian kapal. Dalam praktiknya pembiayaan kapal dapat dilakukan melalui berbagai bentuk atau skema, tergantung pada kondisi keuangan perusahaan pelayaran, tingkat risiko

proyek, serta kebijakan lembaga keuangan yang terlibat. Beberapa bentuk pembiayaan yang umum digunakan antara lain sebagai berikut:

a. Pembiayaan langsung oleh bank

Bentuk pembiayaan ini merupakan metode paling tradisional dan umum dalam industri pelayaran. Bank memberikan pinjaman investasi kepada perusahaan pelayaran untuk membeli atau membangun kapal baru. Jaminan utama dalam pembiayaan ini biasanya adalah kapal itu sendiri, yang dikenal dengan istilah *Ship mortgage* atau hipotek kapal. Artinya, apabila perusahaan gagal membayar pinjaman, pihak bank berhak mengambil alih kapal sebagai aset jaminan.

b. Leasing Atau Sewa Guna usaha

Dalam skema leasing, perusahaan pelayaran tidak perlu langsung membeli kapal. sebagai gantinya, perusahaan leasing membeli kapal tersebut dan kemudian menyewakannya kepada operator dapat memilih untuk memperpanjang kontrak, mengembalikan kapal atau bahkan membelinya sesuai kesepakatan. model ini memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi perusahaan pelayaran, terutama yang ingin menghindari investasi awal yang besar.

c. Joint Venture dan Sindikasi

Skema joint enture dan sindikasi biasanya digunakan untuk proyek pelayaran berskala besar yang membutuhkan dana sangat besar dan

berisiko tinggi. dalam model beberapa lembaga keuangan atau investor bergabung untuk membiayai pembangunan atau pengoperasian kapal secara bersama-sama. Tujuannya adalah untuk membagi risiko dan beban pembiayaan diantara pihak. melalui kerja sama ini, perusahaan pelayaran juga dapat memperoleh keuntungan berupa dukungan teknis, manajerial, atau jaringan pasar dari mitra investasinya. Joint Venture banyak digunakan dalam proyek- proyek pelayaran internasional.

d. Obligasi Maritim (Marine Bonds / Blue Bonds)

Seiring meingkatnya perhatian dunia terhadap keberlanjutan dan ekonomi biru, munculnya bentuk pembiayaan baru yang disebut *obligasi maritim*. Instrumen keuangan ini digunakan untuk mendanai proyek pelayaran yang ramah lingkungan, seperti kapal dengan emisi rendah, sistem pengelolaan limbah kapal, atau pelabuhan hijau. Investor yang membeli obligasi ini turut berkontribusi dalam upaya pelestarian laut dan pengurangan dampak lingkungan dari kegiatan pelayaran

2. Peran Strategi Pemerintah

Pemerintah memiliki peran yang sangat vital dalam menjembatani kesenjangan pasar dan risiko investasi. Peran ini diwujudkan melalui:

- Pemberian jaminan pembiayaan, seperti penjaminan kredit kapal atau jaminan pasar melalui

penugasan tetap.

- Subsidi bunga pinjaman, yang dilakukan melalui lembaga seperti Lembaga Pembiayaan Eksport Indonesia (LPEI) untuk menurunkan beban keuangan pelaku usaha (Sihombing & Surbakti, 2019).
- Regulasi pro-investasi, termasuk simplifikasi izin pelayaran dan insentif untuk investasi kapal ukuran kecil-menengah yang sesuai dengan kondisi pelabuhan terpencil. Kebijakan ini selaras dengan pendekatan pemerintah Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menekankan pembangunan Indonesia dari pinggiran melalui penguatan konektivitas maritim.

3. Tantangan Pembiayaan Kapal

Tantangan utama yang dihadapi sektor pembiayaan pelayaran meliputi:

- Risiko nilai aset, Harga kapal berfluktual mengikuti pasar global.
- Kurangnya jaminan, karena kapal bersifat aset bergerak.
- Biaya operasional tinggi terutama bahan bakar dan perawatan
- Minimnya infrastruktur pendukung seperti galangan kapal dan fasilitas docking dalam negeri.

4. Keterlibatan dan Ketertarikan Sektor Swasta

Keterlibatan sektor swasta dalam pembiayaan kapal untuk daerah terpencil masih bersifat selektif, sangat tergantung pada kepastian permintaan dan jaminan arus balik muatan (backhaul cargo). Studi oleh Lam & Yap (2019) menekankan bahwa insentif fiskal semata tidak cukup; dibutuhkan juga kepastian hukum, skema kontrak transparan, dan stabilitas pasar. Model bisnis yang memberikan penugasan tetap dan perjanjian pengembalian investasi jangka panjang (ROI) lebih menarik minat investor, terutama di wilayah dengan potensi hasil bumi atau pariwisata lokal. Namun, dalam banyak kasus, ketidakpastian arus barang dari daerah terpencil membuat skema ini sulit diterapkan tanpa dukungan pemerintah.

SIMPULAN DAN SARAN

Pembiayaan kapal dan perusahaan pelayaran merupakan fondasi utama bagi penguatan industri maritim Indonesia. Meskipun menghadapi tantangan berupa risiko investasi dan keterbatasan pendanaan, peluang untuk mengembangkan pembiayaan berkelanjutan semakin terbuka lebar. Melalui dukungan kebijakan pemerintah, inovasi instrumen keuangan, serta peningkatan kolaborasi antara sektor publik dan swasta, industri pelayaran Indonesia dapat berkembang menuju arah yang kompetitif, efisien dan berkelanjutan.

Pembiayaan kapal untuk layanan pelayaran ke daerah-daerah terpencil di Indonesia bukan sekadar tantangan teknis, melainkan merupakan isu strategis dalam pembangunan nasional yang menyangkut konektivitas, pemerataan ekonomi, dan ketahanan layanan dasar seperti kesehatan. Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, ditemukan bahwa efektivitas pembiayaan sangat bergantung pada integrasi peran antara pemerintah dan sektor swasta.

Pemerintah memiliki fungsi utama sebagai fasilitator, baik melalui regulasi, penyediaan subsidi, maupun penjaminan pembiayaan. Sementara itu, sektor swasta memiliki peran penting sebagai pelaksana berbasis efisiensi pasar yang mampu mendorong inovasi dan efisiensi operasional. Dalam konteks ini, pendekatan blended finance, yaitu perpaduan antara subsidi langsung (PSO), insentif fiskal, dan skema 3845 | Journal of Innovative and Creativity , 5(2) 2025 kemitraan pemerintah-swasta (PPP), terbukti menjadi strategi pembiayaan yang paling responsif terhadap kompleksitas geografis dan risiko pasar yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2022). *Laporan Stabilitas Sistem Keuangan Nasional*. Jakarta: BI
- Bappenas. (2023). *Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia 2023–2045*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

- Kementerian Perhubungan RI. (2021). *Strategi Pengembangan Transportasi Laut Nasional*. Jakarta: Kemenhub.
- Kinara, C., & Eliyanti, A.,M. (2025). *Pembiayaan Kapal untuk Layanan Pelayaran Daerah Terpencil: Studi Literatur terhadap Peran Pemerintah dan Swasta*. Journal of Innovative and Creativity. 5(2), 3840-3846.
- Kristanto, B., & Heri, S. (2017). *Studi Skema Pembiayaan Pembangunan Kapal Baru Berbasis Multi Vendor menggunakan Fasilitas KUR (Kredit Usaha Rakyat)*. Jurnal Teknik. 2(2), 198-203.
- Kustiwa, R., & Eliyanti, M. (2025). *Pengembangan Pariwisata Bahari Berbasis Blue Economy Development Of Marine Tourism Based On Blue Economy*. Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara. 2(2), 1347-1350.
- World Bank. (2022). *Blue Economy Development Framework*. Washington, D.C.: World Bank Group